

ABSTRAK

Kepulauan Malvinas (dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Falkland Islands* atau Kepulauan Falkland) menjadi wilayah sengketa sejak abad ke-15. Kepulauan ini telah menjadi sengketa antara Argentina dan Inggris hingga terjadinya perang yang disebut sebagai *Malvinas War*. Kemenangan Inggris atas perang tersebut sempat memutuskan hubungan diplomatik di antara kedua negara. Namun, pada tahun 1989, Argentina di bawah kepemimpinan Carlos Menem membentuk sebuah kesepakatan dengan Inggris yaitu *Sovereignty Umbrella*. Kesepakatan tersebut mengikat kedua negara untuk tidak mengangkat isu kedaulatan Kepulauan Malvinas saat menjalankan kerjasama bilateral. Argentina mengakui keberadaan Kepulauan Malvinas di bawah yurisdiksi Inggris. Namun kondisi perpolitikan Argentina yang mengalami instabilitas diakibatkan oleh krisis ekonomi dan krisis sosial yang terjadi membuat Nestor Kirchner, seorang presiden Argentina yang terpilih pada tahun 2003 merubah kebijakan Argentina dan memutuskan untuk mengabaikan eksistensi *Sovereignty Umbrella* dan melakukan klaim atas kedaulatan Kepulauan Malvinas yang kemudian memperkeruh hubungan diplomatik antara Argentina dan Inggris. Dalam upayanya untuk memperoleh kedaulatan Kepulauan Malvinas, Argentina melakukan berbagai strategi dan kebijakan untuk menuntut Inggris melakukan negosiasi ulang terkait dengan status kedaulatan Kepulauan Malvinas. Berdasarkan data yang diperoleh, penulis menemukan sejumlah fakta yang melatarbelakangi perubahan kebijakan Argentina di bawah kepemimpinan Nestor Kirchner. Penelitian kualitatif ini menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan kebijakan Argentina seperti adanya faktor internal yang bersumber dari Nestor Kirchner itu sendiri dan didorong oleh situasi yang dihadapi oleh Argentina, serta adanya dukungan internasional yang diperoleh Argentina.

Kata kunci: Kepulauan Malvinas, sengketa, Argentina, *Sovereignty Umbrella*, Nestor Kirchner, perubahan kebijakan